

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana Umum-Hukum Pidana Khusus	15
B. Tinjauan Umum Mengenai Korupsi	18
C. Tinjauan Umum Mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .	22
D. Tinjauan Umum Mengenai Penyadapan	30
E. Tinjauan Umum Mengenai <i>Rights of Privacy</i>	34
F. Tinjauan Umum Mengenai <i>Safeguards Against Illegitimate Access</i>	36
G. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian	37
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Jenis Data.....	44
D. Lokasi Penelitian	47
E. Alat dan Cara Pengambilan Data.....	48
F. Analisis	49
BAB IV	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50

A. Keterkaitan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan asas <i>rights of privacy</i> dan <i>safeguards against illegitimate access</i> dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi.....	50
1. Akses Tidak Sah (<i>Illegal Access</i>)	52
2. Keterkaitan Penyadapan dengan <i>Rights of Privacy</i>	58
3. <i>Ratio Legal</i> Konstitusionalitas Penyadapan.....	71
4. Penerapan Pembuktian Pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	77
B. Pengaturan SOP (Standar Operasional Prosedur) penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan rencana pengaturan izin sebelum penyadapan dengan asas <i>rights of privacy</i> dan <i>safeguards against illegitimate access</i>.....	107
1. Politik Hukum Pembentukan Kebijakan.....	109
2. Pengaturan Penyadapan di Negara Amerika Serikat, Australia, dan Belanda.....	114
3. Komisi Negara Independen	129
BAB V.....	134
PENUTUP.....	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	135
Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam bab sebelumnya, penulis memberikan saran kepada DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan akademisi, sebagai berikut:.....	135
DAFTAR PUSTAKA	137